



SOCIAL UNREST, PRECAUTIONARY SAVING, HINGGA KEBIJAKAN TARIF TRUMP YANG WAJIB DIWASPADAI

Ariesy Tri Mauleny*

Abstrak

Munculnya social unrest dan precautionary saving menunjukkan kerentanan perekonomian yang direspons dengan perubahan perilaku konsumsi maupun sosial. Kenaikan tarif Trump menjadi 32% juga memberikan efek domino bagi pasar perdagangan Indonesia jika tidak segera diantisipasi. Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis mengapa social unrest dan precautionary saving sebagai indikasi kerentanan perekonomian, serta kenaikan tarif Trump harus segera diantisipasi, dan apa langkah antisipasinya. Beberapa langkah cepat yang dapat dilakukan, diantaranya pendekatan dan negosiasi, mempercepat diversifikasi negara tujuan ekspor, insentif dan stimulus bagi industri-industri terkena dampak, menjaga nilai tukar rupiah, mewaspadaai ketidakstabilan harga emas, memperluas long term planning industri, menghidupkan pasar domestik dengan menjaga kemampuan daya beli khususnya kelas menengah dan menuju kelas menengah yang menyumbang konsumsi 81,49%. Untuk itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi XI perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pemerintah melalui otoritas keuangan dan perdagangan dapat menempuh langkah preventif dan cepat dalam mewaspadaai potensi dampak yang terjadi.

Pendahuluan

Mayoritas penduduk di negara berkembang, biasanya didominasi oleh kelas menengah (*middle income class*) yang menjadi penggerak utama perekonomian. Konsumsi dan produksi kelompok tersebut sangat memengaruhi produk domestik bruto (PDB). Begitu pula dengan Indonesia. Jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah pada tahun 2024 mencapai 66,35% dari total penduduk Indonesia, dengan nilai konsumsi pengeluaran mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat (bps.go.id, 2024).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir. Kerentanan ini dipicu oleh lebih dari 70% kelas menengah bekerja di sektor jasa dan pertanian yang bernilai tambah rendah, dengan kepastian kerja dan jaminan sosial yang minim. Namun, tak dianggap memenuhi syarat untuk mendapat bantuan. Bahkan beberapa wacana pungutan dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil kelas menengah yang semakin menurun daya belinya.

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: ariesy.mauleny@dpr.go.id

Misalnya, kenaikan PPN, penyaluran subsidi BBM, perubahan skema tarif KRL, dan rencana iuran tambahan dana pensiun yang akan memotong upah pekerja (Widadio & Singgih, 2024). Kondisi tersebut, menempatkan kelas menengah terjepit di antara fenomena *social unrest* dan *precautionary saving* yang mengindikasikan kerentanan perekonomian.

Belum usai kerentanan tersebut dimitigasi, perekonomian kembali dihadapkan dengan tantangan kebijakan tarif Trump yang berpotensi merugikan perdagangan, bahkan dikhawatirkan menimbulkan gelombang pemutusan kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis mengapa *social unrest*, *precautionary saving*, dan kenaikan tarif Trump harus segera diantisipasi, serta bagaimana langkah antisipasinya.

Dampak Fenomena *Social Unrest* dan *Precautionary Saving* dan Strategi Mengatasinya

International Monetary Fund (IMF) mendefinisikan *social unrest* sebagai protes, kerusuhan, atau konflik sipil yang dipicu oleh berbagai faktor, terutama ketimpangan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok (Gamal, 2025). Kondisi serba salah kelas menengah dan menuju kelas menengah, pada satu sisi sangat rentan terhadap *social unrest*. Sebuah fenomena multifaset yang muncul dari gabungan keluhan ekonomi, politik, dan sosial. Biasanya diawali dengan perasaan ketidakpuasan yang semakin meluas (Oswaldo, 2025).

Pada sisi lain, kelas menengah dinilai sangat rasional sehingga memiliki andil dalam deflasi yang disebabkan oleh penurunan konsumsi karena menahan belanja (*precautionary saving*). Merujuk data Mandiri Spending Index terlihat penurunan signifikan pada sektor belanja non-esensial menjadi 6,5%, sementara belanja supermarket meningkat ke 15,9%. Fenomena ini menunjukkan masyarakat lebih memilih menyimpan uang sebagai bentuk antisipasi ketidakpastian ekonomi di masa depan yang berdampak pada perubahan pola konsumsi (Rosa, 2025).

Ketimpangan ekonomi dan perasaan ketidakpuasan berpotensi memicu keresahan. Kondisi ini dapat menjadi semakin parah, saat kelas menengah semakin merasa terpinggirkan. *Social unrest* yang terjadi di Chili pada tahun 2019 mendorong lebih dari 1,2 juta masyarakat kelas menengah yang terdesak 'turun kelas', memprotes kebijakan pemerintah. Fenomena yang dikenal sebagai Chilean Paradox ini berdampak buruk pada perekonomian.

Penelitian IMF terkait dampak *social unrest* pada 156 peristiwa di 72 negara menemukan bahwa imbal hasil pasar saham turun rata-rata 1,4 poin persentase. Pada kondisi yang lebih berat, dapat diikuti oleh pengurangan PDB sebesar 1 poin persentase. Kondisi tersebut buruk bagi prospek ekonomi di masa datang (Barrett & Chen, 2021).

Studi Dartanto dkk. (2023) menunjukkan bahwa manfaat dari kebijakan pemerintah periode 2019-2022 terkonsentrasi pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas, namun melupakan kelas menengah (40-80%). Basri (2024) menilai kelas menengah tidak dapat menikmati pertumbuhan ekonomi seperti kelas atas, lantaran tidak berhak atas bantuan sosial karena tidak tergolong miskin. Sementara itu, di saat yang sama, tuntutan terhadap kontribusi pajak dan pungutan dirasakan semakin besar. Kondisi ini akan membuat kelas menengah sebagai *'professional complainers'* menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang mempertimbangkan keberlangsungan hidup kelas menengah termasuk menjaga daya belinya. Hal ini tidak bisa diabaikan agar potensi *social unrest* dan *precautionary saving* yang muncul jelang lebaran lalu, dapat diwaspadai dan dimitigasi secara terstruktur.

Perlu dipikirkan insentif maupun instrumen perlindungan sosial bagi kelas menengah, agar terjaga daya belinya dan tidak turun kelas ketika terjadi guncangan ekonomi. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan menyusun ulang strategi jangka pendek maupun panjang, yang melibatkan perekonomian kelas menengah. Dengan begitu, dapat dicegah kerentanan perekonomian kelas menengah dan diantisipasi potensi guncangan ekonomi makro substansial yang dapat terjadi.

Strategi Mengatasi Dampak Kenaikan Tarif Resiprokal 32 Persen

Memasuki TW II-2025, fenomena *social unrest* dan *precautionary saving* ternyata bukan akhir tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kehadiran kebijakan pengenaan tarif bea masuk Trump kepada 180 negara, yang akan mengubah lanskap perekonomian global, berpotensi menambah berat perekonomian ke depan. Pengenaan tarif timbal balik atau tarif resiprokal 32%, akan berdampak signifikan pada neraca pembayaran kedua negara, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi. Hal ini disebabkan AS adalah mitra dagang bilateral terbesar Indonesia, yang pada tahun 2024 memberikan surplus USD16,8 miliar. Apalagi selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor hanya sekitar 10%, bahkan beberapa barang konsumsi bebas bea masuk karena Indonesia dinilai sebagai negara berkembang penerima fasilitas *Generalized System of Preferences* (Maria, 2025).

Josua Pardede menilai kebijakan ini secara khusus akan memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS. Kenaikan tarif Trump tersebut akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS, khususnya sektor manufaktur berbasis teknologi seperti elektronik, otomotif, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, produk tekstil, alas kaki, dan sejumlah besar produk pertanian. Produk-produk tersebut diperkirakan akan mengalami tekanan berat karena sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi (Indriawati, 2025).

Perlu langkah cepat pemerintah dalam menyikapi kebijakan tarif Trump karena implikasinya akan sangat berat. Mulai dari turunnya ekspor, melemahnya nilai tukar, anjloknya pasar saham, volatilitas pasar keuangan global, naiknya harga emas, penurunan kinerja industri ekspor, dan lain-lain. Dampak terburuk adalah potensi penurunan produktivitas yang dapat berimplikasi pada pengurangan pegawai. Hal tersebut, terjadi di tengah kondisi kinerja perekonomian dan kemampuan daya beli yang melemah. Kecepatan pemerintah melakukan langkah preventif akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perekonomian ke depan.

Beberapa langkah cepat yang dapat dilakukan, diantaranya: 1) pendekatan dan negosiasi kepada Pemerintah AS untuk pengurangan besaran tarif; 2) diversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia, baik dengan memanfaatkan network yang sudah ada maupun yang baru terbentuk seperti BRICS; 3) insentif dan stimulus bagi industri berorientasi ekspor yang terkena dampak pengenaan tarif; 4) menjaga nilai tukar rupiah supaya tidak terperosok lebih dalam akibat berkurangnya pasokan dollar AS di pasar karena turunnya ekspor (Maria, 2025); 5) mewaspadaikan potensi ketidakstabilan harga emas; 6) mendorong industri memiliki *long term planning* yang tidak bergantung pada pasar tertentu, tetapi memperluas dengan mencermati dinamika lanskap ekonomi global; dan 7) menghidupkan pasar domestik dengan menjaga kemampuan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah dan menuju kelas menengah yang menyumbang konsumsi 81,49%.

Penutup

Fenomena *social unrest* dan *precautionary saving* menunjukkan kerentanan perekonomian yang direspons dengan perubahan perilaku, hal ini diperparah dengan kenaikan tarif Trump. Kondisi ini akan memberikan efek domino bagi kinerja perdagangan dan perekonomian keseluruhan. Jika tidak diantisipasi akan berimplikasi pada menurunnya kinerja ekspor, melemahnya nilai tukar, anjloknya pasar saham, volatilitas pasar keuangan global, naiknya harga emas, hingga menurunnya produktivitas. Selain itu, berpotensi menurunkan konsumsi dan mengurangi pegawai. Kecepatan pemerintah mengambil langkah preventif akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perekonomian ke depan.

Komisi XI DPR RI perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan langkah antisipatif Pemerintah berjalan efektif dalam mewaspadaikan potensi dampak yang terjadi. Khususnya yang terkait dengan langkah negosiasi, percepatan diversifikasi tujuan ekspor, insentif dan stimulus bagi industri terkena dampak, menjaga nilai tukar, mewaspadaikan ketidakstabilan harga emas, dan memperluas *long term planning* industri, termasuk menghidupkan pasar domestik dengan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah kebawah.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024, Oktober 25). Kelas menengah Indonesia krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. *Press conference*. <https://www.bps.go.id/id/news/2024/10/25/622/kelas-menengah-indonesia-krusial-sebagai-bantalan-ekonomi-nasional.html>
- Barrett, P. & Chen, S. (2021, Agustus). *The economics of social unrest*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/08/economics-of-social-unrest-imf-barrett-chen.htm>
- Basri, M. C. (2023, Desember 27). Kelas Menengah dan “Chilean Paradox”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/26/kelas-menengah-dan-chilean-paradox>
- Dartanto, T., Can, C. K., Moeis, F. R., & Rezki, J. F. (2023). A dream of offspring: Two decades of intergenerational economic mobility in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 209–241. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970109>
- Indriawati, T. (2025, April 3). *Kebijakan tarif impor Trump bisa berdampak besar bagi ekonomi Indonesia, apa saja?*. <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/04/03/145654088/kebijakan-tarif-impor-trump-bisa-berdampak-besar-bagi-ekonomi>
- Maria, N. S. B. (2025, April 4). Perlu langkah cepat hadapi kebijakan tarif Trump. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/04/04/060000126/perlu-langkah-cepat-hadapi-kebijakan-tarif-trump?page=all#page2>
- Oswaldo, I. G. (2025, Maret 25). Apa itu sosial unrest? Fenomena yang bisa porak-porandakan ekonomi negara. *detikFinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7841417/apa-itu-social-unrest-fenomena-yang-bisa-porak-porandakan-ekonomi-negara>
- Rosa, N. (2025, Maret 25). Daya beli turun gegara precautionary saving, Apa itu? Ini penjelasan dosen ekonomi. *detikEdu*. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7841419/daya-beli-turun-gegara-precautionary-saving-apa-itu-ini-penjelasan-dosen-ekonomi#goog_rewarded
- Widadio, N. A., & Singgih, V. (2024, September 11). Nasib jadi kelas menengah di Indonesia – banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy413z2e8xro>